

## Pengaruh Budaya Strategis pada Kepemimpinan dan Revolusi Islam Iran

Prabaswari

Program Doktorat Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan

e-mail : prabaswari@doktoral.idu.ac.id

### Abstract

*The Islamic Revolution in Iran, led by Ayatollah Imam Khomeini, was a world-shaking movement. Khomeini is both a spiritual leader of the ulama and a well-respected political figure in Iran. The Iran-Iraq war and US economic sanctions for reasons relating to the nuclear program have brought Khomeini's leadership model to the test. Despite these obstacles, Iran has managed to establish a constitutional government that provides the religious elite extraordinary powers so that they may control internal politics as well as external forces that threaten the regime's survival. This study finds that the Islamic Republic of Iran's achievement in building an effective government is due to Iran's ability to convert the flexible Iranian Persian and Shia Islam culture into a strategic culture. This study uses the method of analysis of the study of literature and strategic culture theory, in relation to foreign policy decision making.*

**Keywords:** *Khomeini, strategic culture, leadership, Iran's Islamic Revolution*

### Abstrak

Revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Imam Khomeini merupakan fenomena yang mengguncang dunia. Khomeini sendiri adalah sosok pemimpin spiritual ulama dan sekaligus sebagai pemimpin politik yang sangat dihormati di Iran. Model kepemimpinan yang dipakai oleh Khomeini tersebut mendapatkan banyak ujian, di antaranya adalah perang Iran-Irak serta sanksi ekonomi AS atas alasan program nuklir. Dengan segala macam tantangan tersebut, Iran tetap berhasil membentuk pemerintahan konstitusional yang memberikan kekuatan luar biasa kepada elit ulama, sehingga dapat mengendalikan politik internal dan juga tekanan eksternal, yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rezim. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa keberhasilan Republik Islam Iran membentuk pemerintahan yang efektif tersebut merupakan gambaran

keberhasilan Iran melakukan adaptasi yang fleksibel terhadap budaya Iran Persia dan Islam Syiah yang bertransformasi menjadi budaya strategis. Penelitian ini menggunakan metode analisis studi literatur serta teori budaya strategis, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

**Kata Kunci** : budaya strategis, kepemimpinan, Khomeini, Revolusi Islam Iran

## Pendahuluan

Dalam empat dekade terakhir ini, Iran menjelma menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang banyak menyita perhatian dunia, karena beberapa kebijakan strategisnya yang dinilai kontroversial, anti-*mainstream*, serta sering berseberangan dengan kebijakan negara-negara Barat. Kebijakan berani Iran mulai diambil sejak dibentuknya Republik Islam Iran oleh Ayatollah Khomeini menggantikan rezim monarki sekuler Shah Reza Pahlevi, pada tahun 1979. Revolusi tersebut berhasil meletakkan konstitusi baru yang berlandaskan hukum Islam, tetapi juga memiliki unsur demokratis yaitu pemisahan pemerintahan kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif (Hiro, 2009: 368). Konsep *Velayat-e Faqih* (kepemimpinan oleh ulama) menjadi dasar utama bagi konstitusi Iran, di mana pemimpin tertinggi di saat itu dideklarasikan kepada Khomeini untuk seumur hidup (Abrahamian, 2008: 162-164).

Menurut Amien Rais, pada abad 20 ini, sedikitnya ada tiga revolusi yang berdampak luas, yaitu: Revolusi Rusia (1917), Revolusi Mao Zedong (1949), dan Revolusi Islam Iran (1979). Revolusi Iran termasuk sangat fenomenal karena mampu mengguncang sendi-sendi hubungan Internasional di kawasan Timur-Tengah dan bahkan dunia. Berdirinya Republik Islam Iran telah menempatkan Teheran berada dalam situasi berkonflik secara langsung dengan kepentingan AS. Pada rezim sebelumnya, yaitu kepemimpinan Reza Shah Pahlevi, Iran sangat bergantung kepada bantuan Inggris dan Amerika Serikat. Situasi ini terjadi ketika sebenarnya, kepentingan Inggris dan AS terhadap Iran sangat besar karena suplai minyak Iran sangat dominan di Eropa dan Amerika (Rais, 1996: 199). Dunia Barat saat itu banyak menyuplai persenjataan dan melatih militer Iran, sehingga Iran di masa Shah Pahlevi menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia (Mikail, 2013: 13). AS juga membantu Iran dalam membangun kapabilitas nuklirnya, melalui MoU Iran-AS mengenai pengembangan nuklir Iran (Mikail, 2018: 73).

Dengan jatuhnya rezim Shah, muncullah ketakutan dari dunia Barat terkait dengan dominasi mereka atas Iran. Hal inilah yang membuat AS selalu berusaha menyudutkan rezim Khomeini. Seperti yang dituliskan oleh dua wartawan koran The Asian Wall Street Journal, Gerald F. Seib dan Thomas E. Ricks, Presiden AS George Bush sangat mengkhawatirkan Iran yang disebutnya perlahan tapi pasti akan menjadi kekuatan utama dan berbahaya di Teluk Persia, serta mengancam kepentingan Amerika. (Sihbudi, 1993: 100-110).

Secara kultural, mayoritas rakyat Iran adalah penganut Syiah, yang terikat dengan doktrin *imamah*, yaitu ketaatan mutlak kepada pemimpin agama. Ini adalah situasi yang sangat dikhawatirkan AS. Doktrin ketaatan mutlak kepada ulama membuat rakyat Iran terikat kuat kepada otoritas kepemimpinan agama. Robin W. Carlsen (Algar, 1994: 22), seorang orientalis, menyatakan:

”Khomeini merupakan suatu badai. Orang dapat melihat dengan segera titik diam mutlaknya, tegar dan memerintah, namun juga tentram dan ramah. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak dapat dipengaruhi, tapi itulah yang memengaruhi seluruh Iran. Ia bukanlah manusia biasa, bahkan seluruh orang bijak, wali yang pernah saya temui: Dalai Lama, pendeta Budha, pendeta Hindu, tidak satupun memiliki kualitas kehadiran yang begitu kuat dan menyengat seperti Khomeini.”

Khomeini dinilai konsisten terhadap hukum Islam dan menjadikan Islam sebagai *way of Life*. Karenanya, tradisi Islam dan semangat nasionalisme, menurut Imam Khomeini, hanya boleh berkiblat kepada Islam, bukan pada Barat. Slogan Khomeini yang terkenal adalah: “tidak Timur, tidak Barat, tetapi Republik Islam” (*laa syarqiyyah, laa gharbiyyah, Jumhuriyyah Islamiyyah*) (Arif, 2010: 5). Pernyataan ini bukan semata berdimensi religius, melainkan juga bernuansa politis, dalam rangka mendobrak belenggu imperialisme Barat yang telah lama bercokol, serta sebagai salah satu doktrin karakter bangsa untuk mempertahankan budaya dan identitas Iran (Prabowo, 2021: 3). Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Khomeini memberikan ruang pada elit ulama Syiah untuk memberikan pertimbangan pada pengambilan keputusan terkait dengan isu-isu penting, termasuk kebijakan luar negeri. Iran sendiri telah menegaskan identitas nasionalnya, yaitu Islam Syiah. Selain itu, budaya Iran-Persia juga menjadi faktor yang berpengaruh secara kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Attamimi, 1998: 11-12).

Situasi seperti ini sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang berlaku di Iran sebelum terjadinya revolusi. Pada masa kepemimpinan dinasti Reza Pahlevi dan Reza Khan, budaya Barat menjadi sumber inspirasi dalam modernisasi. Barat menjadi kiblat

*lifestyle* yang semakin lama dirasakan menyimpang jauh dari nilai-nilai agama (Sujati, 2019: 14). Sedemikian tersingkirnya nilai-nilai Islam, sampai-sampai, penguasa Iran di saat itu lebih menghormati Cyrus Agung (pendiri kerajaan Persia) daripada Nabi Muhammad SAW. Hal itu dibuktikan dengan upacara besar-besaran di depan makam Cyrus Agung tahun 1971, dalam rangka memperingati 2.500 tahun kerajaan Iran (Algar, 1994: 22). Pergeseran nilai ini dianggap sebagai sekularisasi, dan menjadi salah satu faktor kuat yang membuat ulama turut serta dalam revolusi (Anis, 2018: 86).

Situasi kebergantungan kepada Barat di masa sebelum Revolusi Islam itu juga dianggap menyalahi kultur Persia selama ini yang cenderung berwatak interpedepensi di tengah-tengah pergaulan internasional. Karya sastra Persia berupa puisi dan syair yang bertemakan invasi, eksploitasi, dan persekusi menjadi sumber motivasi dan landasan bertahannya budaya dan bahasa Persia dalam pergeseran zaman (Kinch, 2016: 30). Dari sisi inilah, Khomeini juga mendorong perlawanan terhadap segala bentuk dominasi atas hak suatu bangsa (Aldosari, 2015: 49).

Sejak masa kepemimpinan Khomeini, Iran banyak menghadapi situasi sulit. Dalam banyak momentum, negara-negara besar dunia sangat sering menyudutkan dan mengancam rezim Khomeini, misalnya dalam kasus invasi Irak ke Iran selama periode 1980 -1988. Irak yang didukung oleh AS, menggunakan senjata kimia sehingga menimbulkan banyak korban jatuh. AS juga mendorong komunitas Internasional untuk menekan Iran sehingga Iran terisolasi dari aktivitas Internasional (Kinch, 2016: 58-59). Selanjutnya, Dinas Rahasia AS (CIA) dan Inggris (MI6) terlibat dalam upaya sabotase terhadap upaya nasionalisasi minyak Iran (Torbat, 2020: 107). Berbagai pengalaman buruk Iran dalam interaksinya dengan Barat menjadikan Iran cenderung menentang supremasi negara besar. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor penting sehingga pemerintah Iran berusaha melakukan manuver dalam pengembangan militernya agar tidak bergantung kepada negara lain (Bahgat, 2007: 3-22). Latar belakang inilah yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Republik Islam Iran yang juga dimaktub dalam Konstitusi Republik Islam Iran 1979.

Pencanangan program nuklir Konstitusi Republik Islam Iran juga mendapat respon negatif dan intervensi dari negara besar dunia. Sentimen negatif ini, menurut Konstitusi Republik Islam Iran, adalah refleksi terhadap penolakan kedaulatan Konstitusi Republik Islam Iran. Komunitas internasional juga terus berusaha mencabut hak pengayaan energi nuklir dari Iran, yang dianggap sebagai provokasi kepada pemerintahan Konstitusi Republik Islam Iran. Hal inilah yang menyebabkan Iran cenderung melakukan resistensi terhadap sistem internasional, karena krisis ini dianggap sebagai *superpower bullying* (Kinch, 2016: 143-144). Sikap resisten tersebut di antaranya diwujudkan oleh Iran dengan tetap melanjutkan program nuklirnya.

Dari berbagai fenomena di atas, muncul pertanyaan, bagaimana Iran bisa bertahan menghadapi berbagai tekanan internasional tersebut. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana identitas dan budaya nasional Iran bertransformasi menjadi budaya strategis sehingga mampu mempengaruhi pengambilan keputusan strategis luar negeri negara itu. Penelaahan atas masalah ini menggunakan studi pustaka terkait dengan teori budaya strategis dan evolusi budaya strategis sebagaimana yang dikemukakan oleh Johnston.

### **Konsep Budaya Strategis**

Budaya Strategis berasal dari kata Budaya dan Strategis. Secara etimologis, istilah budaya pertama kali diperkenalkan oleh Giovanni Andres tahun 1781 (Kartchner, 2009 : 17). Ia memperkenalkan istilah *coltura* untuk menyiratkan kondisi pencapaian manusia yang didokumentasikan secara tertulis, yang merupakan sebuah gagasan yang luas atau bertumbuh.

Pengertian tentang budaya dikemukakan oleh para ahli, di antaranya:

1. E.B. Tylor (1865) menyatakan bahwa budaya merupakan kompleksitas yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan rutinitas lainnya yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. (Taylor dalam Hidayat, 2018: 27)
2. Linton (1945: 8) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sikap perilaku yang dipelajari, dan hasil dari sikap perilaku yang dibagikan dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu.
3. Effat Al-Syarqawi mendefinisikan budaya dari sudut pandang Islam. Menurutnya, budaya adalah khazanah sejarah kelompok masyarakat yang direfleksikan dalam kesaksian dan nilai yang menggariskan makna dan tujuan rohaniah dalam kehidupan. (Syarqawi dalam Fitriana, 2016: 7)
4. Briere mendefinisikan budaya sebagai kumpulan dari materi, intelektual, dan nilai moral, serta kondisi yang memudahkan komunitas masyarakat berkembang secara harmonis. (Briere dalam Bakker, 1984: 18-19).
5. Koentjaraningrat (1990: 180) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara mempelajarinya.

Dari keseluruhan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan cara hidup yang dimiliki dan berkembang pada sekelompok orang, yang diwariskan secara turun temurun, serta terbentuk dari beberapa unsur di antaranya adat istiadat, bahasa, karya seni, agama, dan politik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Pada buku Antropologi Budaya (Wiranata, 2011:121-122), dijelaskan bahwa terdapat tiga tahap proses pewarisan nilai budaya, sebagai berikut.

1. Proses sosialisasi, di mana seorang individu menyesuaikan diri dengan nilai kebudayaan masyarakat di lingkungannya, dimulai dari lingkungan terdekatnya misalnya keluarga, sehingga ia mengetahui dan memahami nilai-nilai budaya lingkungan setempat.
2. Proses internalisasi, adalah proses internal dalam diri individu dalam menerima sosialisasi, di mana dilakukan proses interpretasi (pemahaman) dari nilai-nilai yang diterima tersebut.
3. Proses enkulturisasi, adalah proses menghayati dan menyesuaikan sikap-tindak sesuai dengan sistem dan nilai yang ada di dalam lingkungan budaya masyarakat.

Itulah beberapa poin penting terkait dengan budaya. Konsep berikutnya adalah terkait dengan "strategi". Kata "strategi" didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan sarana militer demi menjamin kelangsungan hidup, kemakmuran institusi, struktur, dan nilai yang dipilih masyarakat. Berbagai hal tersebut ditempatkan dengan perspektif perencanaan jangka panjang dan koordinasi seluruh jajaran terkait di suatu bangsa. Dalam perspektif militer, dikatakan bahwa penyusunan strategis harus memerhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemajuan kepentingan nasional, rencana, kebijakan, doktrin, kegiatan, perspektif atau tujuan, melalui koordinasi atau sinkronisasi semua instrumen kekuatan nasional, termasuk militer, diplomatik, ekonomi, budaya, intelektual, dan informasi (Putra, 2017:26) Menurut Lewis Gaddis (2005 : 9) strategi adalah bagaimana mencari keterhubungan rasional antara tujuan dan sarana/cara, berkaitan dengan kemampuan , tujuan, dan sumber daya.

Ketika budaya dan strategi digabungkan, muncullah istilah "budaya strategis", yang didefinisikan oleh Johnston (2009:34 ) sebagai seperangkat keyakinan, asumsi, dan model perilaku yang berasal dari pengalaman umum dan narasi yang diterima (lisan ataupun tulisan), sehingga membentuk identitas kolektif dan hubungan dengan kelompok lain. Keyakinan, asumsi, dan model perilaku itu sangat menentukan tujuan dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Johnston juga menyatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu terus memengaruhi pemilihan strategi kontemporer, sebagai halangan atau batasan, menjadi suatu rasionalitas dalam pengambilan keputusan negara, salah satunya dalam hal keamanan internasional.

Dengan kata lain, budaya strategis adalah tradisi, nilai, sikap, pola perilaku, kebiasaan, adat, pencapaian, dan cara-cara tersendiri yang dimiliki negara untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan menyelesaikan masalah dalam menghadapi ancaman atau gangguan yang menggunakan segala bentuk paksaan.

Konsep budaya strategis lebih cenderung pada strategi, taktik, dan gerakan yang lebih spesifik untuk diadopsi oleh para pemimpin. Konsep ini melibatkan perhitungan yang lebih rinci atas keragaman dimensi: komposisi kekuatan, logistik, geografi, dan kemampuan, juga strategi dari musuh. Struktur konsep budaya strategis bersifat hierarkis, tetapi itu tidak selalu berarti bahwa satu tingkat menentukan yang lain. (Feng, 2007: 32)

Tingkat strategis dan politik dapat mengarahkan tingkat operasional, tetapi tidak menentukan secara mutlak atas keputusan tingkat operasional. Meskipun keputusan untuk melakukan perang sejalan dengan persepsi umum tentang utilitas yang ditugaskan untuk perang, dalam situasi perang yang sebenarnya, keputusan operasional dibuat secara instrumental sesuai dengan kontinjensi, situasi aktual dari momen historis, serta keputusan pembuat kebijakan tertentu. (Feng, 2007: 33).

Dalam konteks revolusi Islam Iran, Syiah masuk ke dalam bagian budaya lokal Iran melalui proses enkulturisasi, sehingga ajaran ini memengaruhi budaya lokal, dan pada akhirnya, membentuk apa yang disebut sebagai “tradisi Syiah” yang menjadi identitas bangsa Iran. Doktrin *imamah* yang dianut Syiah Iran, bermula dari keyakinan kaum Syiah bahwa imam yang adil akan selalu diturunkan Allah SWT untuk membimbing umat manusia agar tetap berada pada ajaran-Nya. Dalam ajaran Syiah, imam memiliki otoritas seperti halnya Rasul dalam menginterpretasikan wahyu dan memimpin kaum muslimin (Sahide, 2013: 229-230). Syiah meyakini bahwa imam mendapat petunjuk Ilahi sehingga terjaga dari dosa, khilaf, dan meyakini bahwa imam akan membawa manusia kepada keselamatan. (Watt, 1990: 69).

Selain memegang kuat doktrin *imamah*, kaum Syiah Iran memformalkan sistem politik *Velayat-e Faqih*, yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh ulama sebagai wakil imam. Konsep *Velayat-e Faqih* ini menjadi ideologi utama negara (Abrahamian, 2008: 162-164), yang dianggap sebagai puncak pencapaian sempurna dari integrasi antara kehidupan sosial dan agama, sehingga menjadi budaya strategis baru sejak 1979, yang sebelumnya dipudarkan oleh masyarakat Barat melalui budaya sekularisasinya (Mubarok, 2016: 200).

## Evolusi Budaya Strategis

Sebagai sebuah proses yang berlangsung dalam sebuah masyarakat yang hidup, budaya strategis juga mengalami evolusi. Konsep evolusi itu sendiri sebenarnya merupakan suatu teori yang hingga kini masih menjadi perdebatan di antara para ilmuwan di seluruh dunia. Teori tersebut menyatakan terjadinya perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Berangkat dari teori tersebut, para pengkaji budaya kemudian memasukkan teori evolusi dalam hubungannya dengan budaya strategis suatu bangsa. Evolusi adalah konsep terpenting dalam suatu perubahan yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang mengarah pada kemajuan ataupun kemunduran, atau bahkan kehancuran. Prinsip ini mempersatukan keseluruhan sejarah kehidupan. Secara ringkas, evolusi dalam konteks budaya menyatakan bahwa keanekaragaman bentuk pola kehidupan yang baru, muncul sebagai hasil perubahan dan pola tingkah laku manusia.

Menurut Collin Gray (1981:21-47), kebudayaan itu dipelajari oleh generasi berikutnya, bukan diwariskan secara genetik, sehingga bisa saja berubah. Kemudian, Gray juga mendefinisikan secara singkat suatu konsep bahwa budaya strategis adalah dunia pikiran, perasaan, dan kebiasaan dalam berperilaku. Perdebatan tertua tentang budaya strategis terjadi pada abad ke-19 di antara ilmuwan yang menggunakan pendekatan Galilean (positivisme) untuk menjelaskan kausalitas dalam sains dengan para ilmuwan lainnya yang menggunakan pendekatan Aristotelian (idealisme), dengan penekanan teleologis. Namun, seiring berkembangnya waktu, paham positivisme lebih meluas digunakan.

Pemahaman atas adanya evolusi budaya strategis ini sangat penting untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang mengikuti dinamika kehidupan lingkungan strategis di sekitarnya. (Johnson, 2009: 11). Menilai secara analitis nilai budaya strategis dilakukan dengan membuat sebuah konsep, yang dalam pelaksanaannya, konsep tersebut dapat dimodifikasi, dapat memberikan prediksi empiris tentang pilihan strategis yang dapat diuji terhadap model pilihan lainnya. (Johnston, 1995: 49).

Evolusi perang militer adalah contohnya. Strategi perang selalu berubah-ubah, bergantung kepada peningkatan kemampuan produktif, juga konsekuensi sosial, politik, dan militer dari perang yang terjadi secara terus menerus. Perang yang dialami sejumlah negara pastilah menghasilkan banyak literatur militer yang menarik dan sudah pasti akan berevolusi dari sisi kebudayaan strategis perangnya. *Art of War* karya Sun Tzu adalah di antara strategi perang yang paling terkenal. Akan tetapi, strategi perang tidak hanya terkait dengan sikap ofensif. Beberapa aliran pemikiran yang berkembang

tentang perang justru memperdebatkan bagaimana menghindari peperangan tanpa akhir dan meningkatkan strategi penguasaan dan juga kehidupan manusia melalui pola berpikir dari para pemimpin. (Feng, 2007: 17). Evolusi peradaban ribuan tahun juga menumbuhkan budaya strategis yang cinta damai dan defensif.

### **Kepemimpinan dalam Budaya Strategis**

Budaya strategis dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perilaku dari pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Sikap seorang pemimpin akan mewarnai perjalanan sejarah yang berubah dan berevolusi, baik perubahannya itu menuju kepada kemajuan, stagnasi, atau malah bisa menjadi sebuah kemunduran. Demikian pula dengan kepemimpinan militer pada sebuah negara yang menjadi pendukung utama dalam mengambil langkah untuk melindungi kekuatan yang dimilikinya, serta mengurangi resiko atas berbagai kemungkinan buruknya. (Johnson, 2009: 75).

Dihubungkan dengan aspek kepemimpinan ini, budaya strategis dapat memberikan rentang pilihan atau malah cenderung membatasi. Seorang pemimpin dalam konteks budaya strategis pasti akan memperhitungkan sejumlah aspek, seperti transformasi elit, politik birokrasi, siklus teknologi, perdebatan internal, atau krisis eksternal. Aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan budaya strategis tertentu menjadi dominan. (Johnston, 1995:64). Ringkasnya, kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan melihat ke depan, mempertahankan fleksibilitas, serta memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diperlukan.

### **Budaya Strategis dan Kaitannya dengan Kebijakan Luar Negeri**

Pada zaman sekarang, aspek budaya mulai masuk dalam ranah keamanan internasional. Situasi ini makin terlihat dengan jelas sejak berakhirnya perang dingin, yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya era bipolar (dua kutub kekuatan Blok Barat dan Blok Timur). Pembahasan terkait hubungan antara budaya dan masalah politik internasional dimulai sejak Perang Dunia ke-II, dan diawali dengan pendanaan AS untuk operasi dalam rangka mempelajari karakter nasional (budaya-strategis) musuh mereka, yaitu Jerman dan Jepang.

Masalah budaya dibahas secara serius dalam konteks politik internasional. Kajian budaya dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

- a. Bagaimana suatu negara bertindak di masa lalu, di mana perilaku mereka sebelumnya akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada saat ini, dan juga pilihan-pilihan di masa depan.

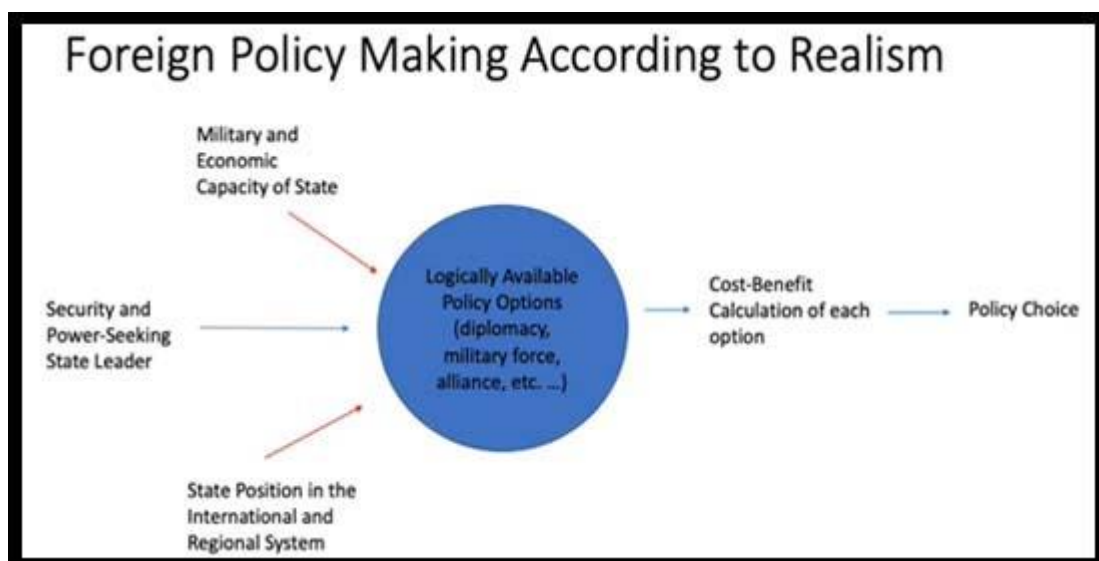
- b. Bagaimana negara dianggap sebagai “makhluk” yang cenderung bertindak berdasarkan “cara mereka”, di mana identitas dan karakter memengaruhi pengambilan keputusan.

Keterkaitan dan saling kebergantungan ini menghasilkan suatu konteks yang disebut sebagai budaya strategis, yang kemudian berkaitan juga dengan karakter nasional sebagai sumber dari segala sesuatu yang dianggap budaya dalam politik luar negeri. Budaya strategis sebagai konteks dapat dibagi menjadi :

- a. Perilaku sejarah nasional;
- b. Karakter dan identitas nasional.

Berikut ini akan kita bandingkan bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri sesuai konteks realisme dan bagaimana pengaruh budaya strategis pada pengambilan keputusan tersebut. Sesuai dengan paham realisme, suatu pemikiran penentuan kebijakan hanya didasarkan kepada kapasitas negara, pemimpin negara, dan posisi negara pada sistem internasional. Kemudian, secara logis, disusun beberapa opsi, dan kemudian diukur biaya dan keuntungan dari masing-masing opsi sehingga menghasilkan suatu opsi kebijakan (Johnston, 1995 : 40-60). Berikut ini adalah bagan model model kebijakan luar negeri yang didasarkan kepada perspektif realisme.

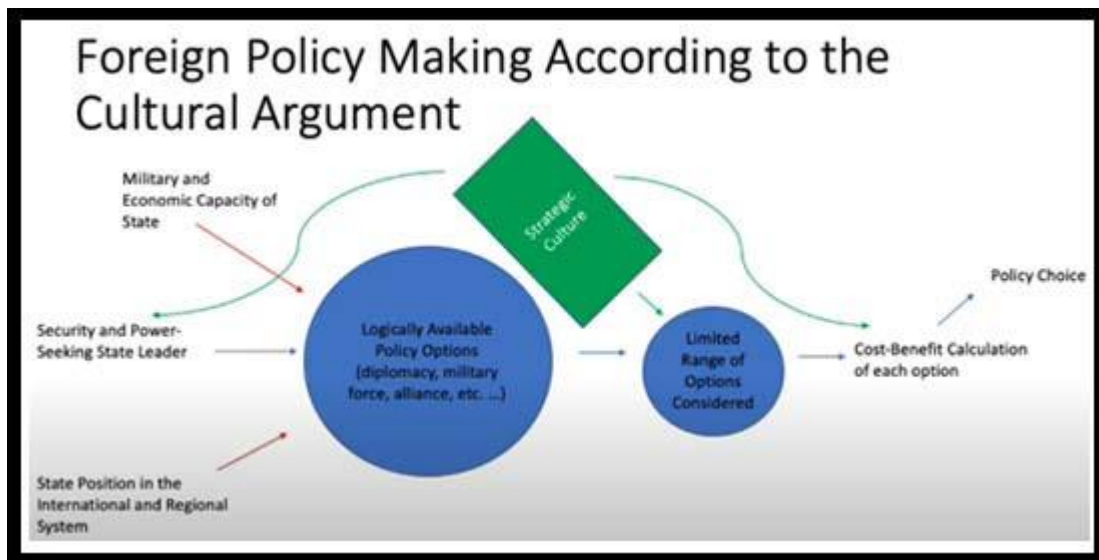
**Gambar 1. Foreign policy making Berdasarkan Realisme**



*Sumber: Johnston (1995)*

Dengan adanya sentuhan Budaya Strategis maka proses pembuatan kebijakan luar negeri mengalami dinamika, di mana Budaya Strategis akan membatasi pimpinan dalam membuat opsi kebijakan (Johnston, 1995:63) . Pembatasan yang muncul tersebut akan menghasilkan pertimbangan yang lebih mempersempit opsi kebijakan, seperti dirangkum dalam Gambar 2 berikut ini.

**Gambar 2. Foreign policy making Berdasarkan Argumen Kultural**

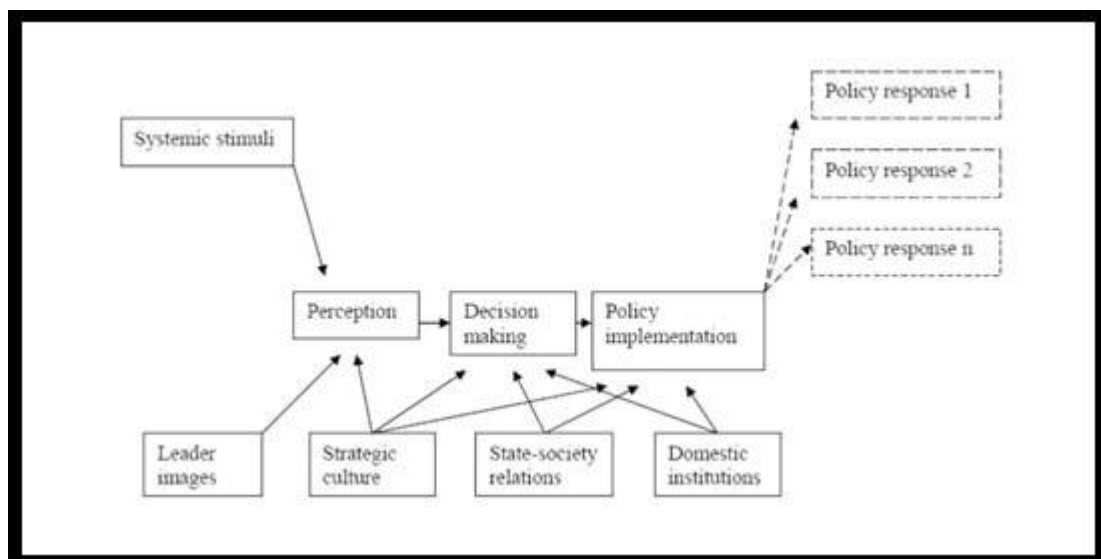


*Sumber: Johnston (1995)*

Dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, pendekatan realisme neoklasik telah menjadi teori realisme terkini dan juga paling banyak digunakan untuk mengamati kebijakan-kebijakan politik. Berbeda dengan neorealisme, pendekatan realisme neoklasik lebih menyerupai pendekatan realis klasik dalam hal pengamatannya terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan negara dibentuk oleh para pemimpin politik dan birokrasi seperti presiden, perdana menteri, dan aktor lain yang secara resmi ditugaskan sebagai pembuat kebijakan luar negeri. Pendekatan ini sangat memperhatikan bagaimana para pemimpin tersebut memperhitungkan segala macam kendala dan keterbatasan yang tidak hanya berasal dari eksternal, melainkan juga dari aspek internal. Para pemimpin negara mengambil kebijakan luar negeri berdasarkan kepada sejumlah aspek, yaitu kepentingan nasional yang didasarkan kepada persepsi mereka sendiri, batasan budaya internal, serta motivasi negara lain atau tekanan internasional. Selanjutnya, persepsi akan menentukan proses pengambilan keputusan,

yang di dalam prosesnya juga melibatkan hubungan negara-masyarakat, institusi domestik, serta budaya strategis. Dari sanalah diambil sebuah kebijakan luar negeri untuk diimplementasikan. Implementasi atas kebijakan tersebut tentunya akan menimbulkan beragam reaksi, baik domestik maupun internasional. Secara singkat, proses pengambilan kebijakan luar negeri menurut paham realisme neoklasik, digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 3. Model Neoklasikal Realisme pada Kebijakan Luar Negeri**



*Sumber: Lobell, et al., (2009:42)*

### **Budaya Strategis dan Sejarah Iran**

Budaya dan sejarah Iran menjadi dasar paling penting bagi pembentukan budaya strategis Iran. Ada tren dalam sejarah yang bisa dijadikan sebagai perspektif saat menganalisis budaya strategis Iran, seperti kesamaan antara kepercayaan Iran lama dalam kerajaan absolut dan konsep modern *Velayat-e Faqih* yang dikembangkan oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya strategis yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kepemimpinan Republik Islam Iran, termasuk pengambilan keputusan tentang isu-isu yang berkaitan dengan program pengayaan nuklir. Elemen-elemen tersebut adalah pemahaman atas

sejarah Iran dan identitas bersama secara geografi, eksistensi kelompok lain, ancaman, aset yang dimainkan, ideologi, dan agama.

Berdasarkan sejarah Iran, dinamika politik yang terjadi pada akhir abad ke-15 meletakkan pondasi bagi Iran untuk menegaskan identitas nasionalnya dalam bentuk Syiah untuk pertama kalinya. Shah Ismail (Dinasti Safawi) menggunakan suku Turkmen yang dikonversi sebagai tentara, untuk memperluas kekuasaan hingga ke kota Tabriz dan mengklaim seluruh wilayah yang pernah diperintah oleh Sassanid Iran sebagai kawasan Islam Syiah. Ismail menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi dinasti Safawi yang baru. Peran Ismail yang ditunjuk sendiri sebagai penguasa absolut yang dianggap sah secara Islam, bergema dengan budaya Iran sehingga menghasilkan ideologi politik-agama, yaitu Islam mazhab Syiah.

Di era modern, salah satu ide mendasar Konstitusi Republik Islam Iran adalah sikap resistensi gerakan revolusi Islam Iran terhadap negara-negara Barat pada umumnya, dan Amerika Serikat pada khususnya. Sikap resisten tersebut sangat kental dengan nuansa agama (mazhab Syiah), dan ini bisa dilihat dari berbagai jargon revolusi, hingga kepada dicantumkannya mazhab Syiah (Ja'fari) sebagai mazhab resmi negara di dalam konstitusi Republik Islam Iran.

Dalam konteks budaya strategis, pilihan Konstitusi Republik Islam Iran untuk bersikap resisten terhadap Barat dengan menggunakan elemen mazhab, tentu punya kaitan dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu Iran, yaitu sejak masa ketika Safawi berkuasa di kawasan itu. Iran yang mengalami kejayaan peradaban di masa Safawi kemudian mengalami masa-masa kurang menyenangkan saat berinteraksi dengan Barat modern, berupa penjajahan yang dilanjutkan dengan intervensi politik ekonomi yang kuat terhadap pemerintahan Dinasti Pahlevi.

Atas dasar pengalaman sejarah itulah kepemimpinan Konstitusi Republik Islam Iran memutuskan untuk mengambil ideologi yang memanfaatkan konsolidasi Islam Syiah terhadap kelompok ulama. Dalam ideologi ini, Iran dan Islam-Syiah adalah satu dan sama, tak terpisahkan. Iran beroperasi di bawah doktrin politik-agama Ayatollah Khomeini yang unik, yang menekankan kelangsungan hidup rezim sebagai pelayanan utama bagi Islam. Ancaman pihak luar juga dipersepsikan sebagai ancaman atas agama, dan ancaman tersebut menjadi manifestasi penting dari budaya strategis. Gaya kepemimpinan Konstitusi Republik Islam Iran mencerminkan elemen adaptif yang fleksibel, yang berasal dari budaya Iran Persia dan Islam Syiah.

## Identitas Nasional Iran

Kunci memahami politik luar negeri suatu negara adalah dengan mengetahui identitas negara tersebut. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Iran sejak beberapa abad yang lalu telah menganut ideologi politik-agama yang sangat khas. Dalam ideologi ini, Iran dan Islam Syiah adalah satu dan sama, tak terpisahkan. Jauh sebelum revolusi, para sejarawan sepakat bahwa Syiah Imamiyah ditetapkan sebagai agama resmi oleh Shah Ismail dari Dinasti Safawi (berkuasa sekitar tahun 1500-an). Shah Ismail mengeluarkan dekret revolusioner bahwa seluruh umat Islam yang tinggal di teritorial kerajaannya menerima satu mazhab Islam yang menegaskan kesamaan antara keimanan kepada agama yang benar dengan loyalitas kepada negara; dan mazhab itu adalah Syiah Imamiyah.

Mereka menetapkan bahwa Shah merupakan guru spiritual yang memiliki kharisma dan memperoleh kewenangannya dari Tuhan, sehingga mendapatkan otoritas mutlak dalam urusan spiritual dan duniawi. (Black, 2006: 404). Para ulama Syiah selalu memiliki kedudukan penting dalam tatanan masyarakat Iran, tak terkecuali saat kepemimpinan Dinasti Pahlevi. Mereka tetap menjalankan kontrol sosial sebagai oposisi yang efektif, serta mempertahankan identitas nasional dari gempuran sekularisme Barat, sehingga terjadilah gerakan revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Akibat dari gerakan itu, pada tahun 1979, terjadi perubahan yang sangat radikal dari tatanan politik Iran, yang tadinya berbentuk monarki konstitusional menjadi Republik Islam Iran. Hal ini dinyatakan pada UUD Konstitusi Republik Islam Iran Bab 1 pasal 1 berikut.

Pemerintah Iran adalah Republik Islam, yang disepakati rakyat Iran, berdasar kepada keyakinan abadi atas pemerintahan Al-Quran yang benar dan adil, menyusul kejayaan Revolusi Islam dibawah pimpinan Ayatullah Al-Uzma Imam Khomeini, yang dikukuhkan dengan Referendum Nasional pada tanggal 10 dan 11 bulan Farvadin tahun 1356 Hijriah Syamsiyah (29-30 Maret 1979), atau 1 dan 2 Jumadil Awal 1399 H. dengan mayoritas 98,2% suara dari orang-orang yang memiliki hak memberi suara persetujuan. (Humas Kedutaan Besar Konstitusi Republik Islam Iran di Jakarta, UUD Konstitusi Republik Islam Iran, halaman 15).

Khomeini juga menyatakan bahwa ulama (*fuqaha/faqih*) memiliki peran sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemimpin politik. Hal ini dikarenakan mazhab Syiah memandang bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan, tidak ada pemisahan keduanya, baik dalam tatanan konseptual maupun praktek politik (Lukpinius, 2018:50). Dalam argumen pernyataannya terkait ulama sebagai pemimpin politik, Khomeini mengambil perkataan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kaum mukmin yang (tergolong

sebagai) *fuqaha* adalah benteng Islam. *Fuqaha* bertugas menjaga akidah, hukum dan tatanan Islam, sehingga para *fuqaha* juga bertugas mengawasi permasalahan eksekutif dan administratif negara, termasuk semua perencanaannya (Sihbudi, 1996: 18).

Dalam praktiknya, setelah revolusi, selain organisasi formal kementerian-kementerian, Khomeini membentuk lembaga kepemimpinan yang sudah dimodifikasi dan dikenal sebagai *Velayat-e Faqih*. Terdapat lima lembaga penting dalam konstitusi Konstitusi Republik Islam Iran yaitu *Faqih*, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Penjaga Konstitusi. Dari kelima lembaga itu, lembaga yang paling esensial dan paling strategis adalah *faqih*. Seorang *faqih* yang dipilih oleh Dewan Ahli memiliki kekuasaan paling besar dalam sistem politik Konstitusi Republik Islam Iran. Hukum yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan berlandaskan Hukum Islam yang berasal dari perintah Allah (Iqbal, 2010: 244).

Khomeini berpandangan ada tiga karakteristik dalam pemerintahan Islam yaitu: tidak bersifat tirani, berlandaskan hukum, dan memberlakukan pemerintahan Islami. Tidak bersifat tirani maksudnya adalah tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan legitimasi keagamaan. Kemudian, konstitusionalitas kekuasaan pada sistem *Velayat-e Faqih* harus berdasarkan kepada hukum Tuhan, bukan hanya atas dasar suara terbanyak. Sementara itu, berbasis hukum diartikan bahwa kedaulatan hanya milik Allah dan hukum merupakan keputusan dan perintah-Nya. Selain itu, pemberlakuan pemerintahan Islam artinya bahwa hukum Allah berlaku pada siapa saja, dan manusia wajib mematuhi. Dalam konstitusi, posisi tertinggi ada pada seorang *wali faqih* (pemimpin agama), dan orang yang pertama kali menjabat sebagai *wali faqih* adalah Khomeini (Sari, 2017: 88).

### **Faktor-Faktor yang Membentuk Budaya Strategis Republik Islam Iran.**

Profil budaya strategis kepemimpinan Konstitusi Republik Islam Iran ini mengalir dari berbagai pengalaman, ideologi, dan realitas praktis yang diwarisi oleh orang-orang Iran modern dari nenek moyang mereka. Prosesnya diawali sejak masa Kerajaan Persia Kuno, tahun 559 SM, di mana Cyrus Agung mampu membangun dinasti yang sangat luar biasa pada masanya. Bangsa Iran Persia sudah mengenal peradaban bahkan jauh lebih awal dibandingkan bangsa Arab. Selanjutnya, setelah masuknya ajaran Islam, bangsa Persia juga mampu beradaptasi sehingga semakin menciptakan peradaban yang tinggi. Muncul banyak tokoh ilmu pengetahuan yang terkenal dari Persia seperti Muhammad Musa Al-Khawarizmi, Umar Khayyam, dan sebagainya. Pada masa itu, Persia menjadi tumpuan penyebaran ilmu pengetahuan, sains, filsafat, dan teknik. Selanjutnya, pada Tahun 1501, Shah Ismail dari Dinasti Safawi berhasil membentuk kerajaan Syiah

Imamiah, di mana semua organ pemerintah menganut mazhab Syiah. Kebudayaan Iran juga telah lama mempengaruhi budaya lainnya di Timur Tengah. Bahasa Persia bahkan menjadi bahasa intelektual selama milenium kedua Masehi. (Suryani, 2021: 170-176).

Sebelum masa revolusi, yakni saat kepemimpinan Muhammad Reza Pahlevi, hubungan Iran dan Amerika sangat erat. Hal ini karena Amerika membantu mengembalikan singgasana Reza Pahlevi setelah percobaan kudeta nasionalisasi minyak Iran oleh PM Mosaddeq. Personil Amerika Serikat mendapat kekebalan hukum dan hak-hak istimewa selama berada di Iran. Bahkan Shah juga memerintahkan untuk tidak menyinggung Israel. Pada masa ini, ulama dan rakyat merasa berada di bawah jajahan Amerika dan Israel. Hal inilah yang memicu perjuangan dan revolusi di Iran (Komariah, 2016: 65). Pengalaman imperialisme Amerika Serikat ini menumbuhkan kebencian Khomeini kepada Amerika dan sekutunya, hingga menimbulkan sikap resisten terhadap negara adikuasa yang dianggap menindas tersebut.

Selanjutnya, pada awal terbentuknya Konstitusi Republik Islam Iran, Iran mengalami perang selama delapan tahun dengan Irak, yang dikenal dengan nama Perang Teluk. Saat itu, negara-negara Eropa dan AS yang merasa khawatir dengan revolusi Islam Iran, berada di pihak Irak pada Perang Teluk tersebut. Iran berkali-kali menyampaikan protes kerasnya atas penggunaan senjata kimia Irak, namun tidak mendapat respons dari komunitas Internasional. Pengalaman ini membuat Iran makin kehilangan kepercayaan kepada rezim internasional. Berbagai rentetan peristiwa penting yang terjadi pada tahun-tahun awal revolusi sangat memengaruhi hubungan Iran dengan negara Eropa dan AS. (Komariah, 2016: 80-85).

Sederet pengalaman nasional yang menyakitkan selanjutnya menjadi latar belakang yang mendorong Iran untuk melakukan upaya pertahanan dan perlawanan yang dilandasi dengan nilai-nilai budaya strategis. Ringkasnya, faktor-faktor yang membentuk budaya strategis Iran adalah :

1. Sejarah Kerajaan Persia Kuno, yang memiliki peradaban tinggi di bawah kepemimpinan Cyrus Agung, yang membentuk kebanggaan bangsa Iran sebagai pemimpin peradaban dunia;
2. Penetapan Syiah Imamiah sebagai mazhab resmi pemerintahan Dinasti Safawi di masa Shah Ismail, yang menjadi pengalaman sejarah pertama, di mana mazhab Syiah diadopsi oleh sistem politik.
3. Pengalaman Imperialisme oleh bangsa Amerika Serikat, yang bertindak sewenang-wenang saat kepemimpinan Shah, membentuk sikap nasionalisme bangsa Iran;

4. Perang Teluk Irak-Iran, dan keberpihakan komunitas internasional (terutama Barat dan AS) kepada Irak, walaupun Irak terbukti melakukan pelanggaran, termasuk menggunakan senjata kimia yang dilarang. Hal seperti ini kemudian mempertebal ketidakpercayaan Iran terhadap komunitas Internasional.
5. Sanksi ekonomi yang dilakukan Eropa dan Amerika, membentuk semangat resistensi dan kemandirian Iran.

Saat ini, Iran bertransformasi menjadi salah satu kekuatan yang menunjukkan perlawanan kepada dominasi kapitalis. Iran menjadi bangsa yang independen dan mandiri, tidak berkiblat dan meminta bantuan kepada negara kapitalis Barat maupun Timur. Pascarevolusi, Imam Khomeini mulai mengubah kebijakan ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan asing menjadi lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Iran. Beberapa kebijakan nasionalisasinya di antaranya adalah pencabutan izin nelayan asing untuk industri, peralihan kepemilikan tuan tanah pada petani miskin, pemberantasan buta huruf, pembangunan sekolah dan pelayanan kesehatan, dan sebagainya untuk kepentingan rakyat (Sihbudi, 1989: 70). Imam Khomeini selalu menghimbau seluruh negara Islam untuk membuang ketergantungan mereka terhadap penguasa negara besar, dan hal ini termuat dalam slogan Khomeini yang terkenal yaitu "tidak Timur, tidak Barat, tetapi Republik Islam" (*Laa Syarqiyyah, Laa Gharbiyyah, Jumhuriyyah Islamiyyah*) (Arif, 2010: 5).

### **Pengaruh Budaya Strategis dalam Isu Program Nuklir Iran**

Program nuklir Iran saat menjadi salah satu isu hangat di dunia. Iran dikenai sanksi ekonomi oleh AS dan beberapa negara sekutu AS dengan alasan adanya ancaman senjata nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran, meskipun Iran membantahnya. Menurut Iran, program nuklirnya itu bukan untuk pengembangan senjata, melainkan semata-mata untuk tujuan damai. Seperti yang dikutip oleh Smith (2017:17), pemimpin Iran Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak membenarkan penggunaan senjata nuklir, karena ajaran Islam secara jelas mengharamkan pengembangan segala macam senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Khamenei juga menyatakan bahwa senjata nuklir tidak pernah masuk dalam strategi pertahanan Iran. Selain menolak tuduhan Barat, Iran juga mempertanyakan standar ganda mereka terkait dengan program nuklir. Jika nuklir dianggap berbahaya dan Iran tidak boleh memilikinya, mengapa negara adikuasa boleh memilikinya? Dan jika nuklir baik bagi Barat, mengapa Iran tidak boleh menggunakannya?

Komunitas internasional sendiri cenderung menduga bahwa program nuklir Iran itu dikembangkan untuk membangun industri senjata. Kebijakan tersebut diambil Iran tak lepas dari pengalaman pahit di masa lalu, di mana Barat membantu Irak dalam perang panjang dan mahal, bahkan ketika Irak di saat itu menggunakan senjata kimia pemusnah massal. Pengalaman ini diduga kuat telah membentuk pandangan Iran tentang dunia luar, serta membentuk perspektif strategis mereka saat ini, juga keyakinan bahwa Barat, khususnya Amerika Serikat, adalah ancaman eksistensial terbesar bagi Iran. Dihadapkan dengan kenyataan tersebut, Iran memutuskan untuk mengaktifkan kembali program nuklir mereka. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, nampaknya nuklir juga berfungsi menjadi *deterrence factor* yang bertujuan untuk mencegah intervensi AS. Barat melihat bahwa para pemimpin Iran tampaknya percaya, bagaimana kemampuan nuklir akan memengaruhi sikap penentangan AS dan sekutunya terhadap berbagai agenda kebijakan dalam dan luar negeri Teheran. Amerika Serikat tidak akan mau menghadapi Iran yang bersenjata nuklir, seperti halnya Amerika Serikat yang tampaknya enggan menghadapi Korea Utara yang bersenjata nuklir (Sundari, 2013: 27). Hal ini juga didukung pernyataan dari Kenneth Waltz (Buzan, 1991: 169): *“Jika suatu negara memiliki senjata nuklir, mereka tidak akan diserang secara militer atau dengan cara yang dapat mengancam kepentingan vitalnya. Hal ini benar 100 persen, tanpa terkecuali, selama periode lebih dari 50 tahun.”*

Sebelumnya, pada masa pemerintahan Shah, Iran sudah memiliki dua reaktor nuklir di Bushehr yang diperuntukkan sebagai industri listrik bertenaga atom, yang kemudian rusak parah karena perang dengan Irak. Untuk mengintervensi balik Irak dan sekutunya dan atas desakan masyarakat, Iran memutuskan untuk bangkit kembali dan melanjutkan program nuklirnya. Langkah ini terus menarik perhatian Dunia, dan mendapat beragam respons dari berbagai belahan dunia, termasuk Barat dan Timur Tengah. Beragam upaya dilakukan negara sekutu untuk memblokir program nuklir Iran. AS berkali-kali mengemukakan kecurigaannya bahwa Iran adalah negara yang sedang mengembangkan senjata nuklir. AS menentang pengembangan program nuklir dengan alasan bahwa Iran berpotensi melakukan penyimpangan program nuklir menjadi pembuatan senjata nuklir (Ni'matul, 2017: 39-45).

Meskipun terus berhadapan dengan segala macam tekanan, Iran tetap mengembangkan program nuklirnya, sebuah sikap yang membuat Barat semakin khawatir. Sikap Iran tersebut bersesuaian dengan konsep budaya strategis. Tenaga nuklir, baik hanya untuk keperluan damai ataupun dalam rangka membuat senjata, diperlukan oleh Iran yang memiliki sejarah panjang budaya strategis berusia ribuan tahun. Iran yang memiliki industri energi nuklir adalah kekuatan di kawasan regional dan

bahkan di tingkat dunia, yang melanjutkan kejayaan peradaban Persia, Safawi, serta doktrin mazhab Syiah yang telah menjadi bagian dari budaya bangsa itu. Bahkan jika diasumsikan bahwa Iran memang berniat menjadikan industri nuklir sebagai pengembangan senjata, proyek nuklir juga akan menjadi kredibilitas besar bagi para pemimpin dan ulama Iran. Senjata-senjata ini dapat memperkuat posisi mereka di kawasan. Kemampuan senjata nuklir akan menjadikan Iran kekuatan besar di dunia Islam yang bebas dari intervensi negara manapun.

### **Simpulan**

Persepsi dan cara pandang para pemimpin Iran, dari mulai Ayatollah Khomeini dan juga penggantinya, yaitu Ayatollah Khamenei, sangat dipengaruhi erat oleh nilai-nilai budaya dan identitas nasional Iran. Budaya strategis Iran terbentuk dari berbagai pengalaman, ideologi, dan realitas praktis yang diwarisi oleh orang Iran modern dari nenek moyang mereka. Lintasan sejarah panjang Iran dipenuhi dengan berbagai peristiwa dan situasi yang sangat dinamis, mulai dari kejayaan Persia yang menjadi salah satu kutub peradaban besar Dunia, hingga kejayaan Dinasti Safawi dan Iran di zaman modern yang berhasil mendirikan Republik Islam Iran.

Akan tetapi, Iran juga punya pengalaman pahit, mulai dari penjajahan di masa kolonialisme, cengkeraman kuat Barat terhadap rezim Pahlevi, hingga perang berkepanjangan Iran-Irak, di mana Iran sendirian menghadapi Irak yang didukung oleh AS dan sebagian besar komunitas internasional. Bagi Iran, sikap AS, Barat, dan komunitas internasional yang tetap mendukung Irak, meskipun Baghdad secara terang-terangan menggunakan senjata kimia Irak selama masa perang, adalah sebuah sikap yang menyakitkan. Upaya Iran untuk membangun negaranya dari puing-puing kehancuran akibat perang juga menghadapi tantangan besar. Iran hingga kini terus berhadapan dengan beragam sanksi internasional akibat sikap resisten Iran terhadap AS dan sekutunya, serta adanya kecurigaan komunitas internasional terkait dengan program senjata nuklir Iran.

Sampai sejauh ini, Iran tetap bertahan dengan sikap-sikap resistennya. Sikap-sikap tersebut bisa difahami dengan menggunakan pendekatan budaya strategis. Sejarah panjang Iran membuat bangsa ini memiliki seperangkat keyakinan, asumsi, dan model perilaku yang berasal dari pengalaman umum dan narasi yang diterima, yang membentuk identitas kolektif dan hubungan dengan kelompok lain. Iran memiliki tradisi, nilai, sikap, pola perilaku, kebiasaan, adat, pencapaian, dan cara-cara tersendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan dalam upayanya menghadapi berbagai

macam ancaman atau gangguan dari pihak luar, termasuk saat terlibat dalam perang dengan Irak, atau di saat sekarang ini menghadapi sanksi dari AS dan Barat.

### Daftar Pustaka

- Aldosari, N.R. (2015). Foreign Policy from Khatami to Ahmadinejad There is One Foreign Policy in Iran, which is Khamenei's Foreign Policy. *Foreign Policy*, 2 (1), 47-72.
- Algar, H. and Carlsen, R.W. (1994). *Mata air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*. Jakarta: Mizan.
- Anis, M. (2013). *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al-Faqih*. Jakarta: Mizan
- Arif, M. (2010). Pengaruh Pemikiran Ayatullah Khomeini terhadap Pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam Mengambil Kebijakan Politik Luar Negeri Iran. *FISIPOL (Hubungan Internasional)*, 5 (5).
- Attamimi, S.K. (1998). Pemikiran Politik Imam Khomeini. *IAIN Sunan Ampel Surabaya Digital Library*, [online]. Dalam: <http://digilib.uinsby.ac.id/17286/> [Diakses 23 Juni 2021].
- Bahgat, G. (2007). Iran, Israel and the United States the Nuclear Paradox. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 32(1), 3.
- Bakker SJ, J.W.M. (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Black, A. (2006). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Cain, A.C. (2002). *Iran's Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction*. [online] Air University Press. Dalam : [https://www.jstor.org/stable/resrep13692?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/resrep13692?seq=1#metadata_info_tab_contents) [Diakses 19 Agustus 2021].
- Feng, H. (2007). *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making: Confucianism, Leadership and War*. London: Routledge Publisher.
- Fitriana, F. dan Rusni, A. (2020). *Menumbuhkan Budaya Literasi Dengan Memanfaatkan Teknologi*. [online] Research Gate. Dalam: [https://www.researchgate.net/publication/343054220\\_Menumbuhkan\\_Budaya\\_Literasi\\_Dengan\\_Memanfaatkan\\_Teknologi](https://www.researchgate.net/publication/343054220_Menumbuhkan_Budaya_Literasi_Dengan_Memanfaatkan_Teknologi) [Diakses 15 Juli 2021].

- Gray, C.S. (1981). National Style in Strategy: The American Example. *International security*, [online] 6 (2), 21-47. Dalam: <https://doi.org/10.2307/2538645> [Diakses 18 Juli 2021].
- Gaddis, J.L. (2005). *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War*. London: Oxford University Press.
- Hidayat, R.S., dkk. (2018). *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hiro, D. (2011). *Inside Central Asia: A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyz stan, Tajikistan, Turkey, and Iran*. New York: Abrams Press
- Humas Kedutaan Besar Konstitusi Republik Islam Iran di Jakarta. *UUD Konstitusi Republik Islam Iran*.
- Iqbal, M. Dan Nasution, A.H. (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Johnston, A.I. (1995). Thinking about Strategic Culture. *International security*, 19(4), 32-64.
- Kartchner, K. and Johnson, J. (2009). *Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction: Culturally Based Insights Into Comparative National Security Policymaking*. New York: Springer
- Kinch, P. (2016). *The US-Iran Relationship: The Impact of Political Identity on Foreign Policy*. London: Bloomsbury Publishing.
- Koentjaraningrat, (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Bandung: Rineka Cipta.
- Komariah, S. (2016). *Konsep Revolusi Islam Iran Menurut Imam Khomeini*. [online] UIN Syarif Hidayatullah. Dalam: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33103/1/SITI%20KOMARIAH.p> [Diakses 11 September 2021].
- Kun M, P., Juariah, J. and Irawati, A. (2019). *Program Pelatihan Origami sebagai Pengenalan Budaya Jepang pada Guru Dan Murid PAUD Assova untuk Karya Pengabdian Masyarakat (Lanjutan)*. [online] UNSADA. Dalam: <http://repository.unsada.ac.id/1741/> [Diakses 16 Juni 2021].
- Linton, R. (1945). *The cultural background of personality*. Michigan: D. Appleton-Century Company, incorporated

- Lobell, S.E., Ripsman, N.M., Taliaferro, J.W. and Taliaferro, J.W. eds., (2009). *Neoclassical realism, the state, and foreign policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lukpinius, L. (2016). KONSEP WILÂYAH AL-FAQÎH DALAM SISTEM POLITIK SYIAH IMAMIYAH. *Manthiq*, [online] 1(1). Dalam: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/307> [Diakses 27 Juli 2021].
- Mikail, K. (2013). Iran di Tengah Hegemoni Barat (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979). *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(2).
- Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 2(1), 69-85. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.18>
- Mubarak, S. Dan Gontor, U.D. (2016). Fatwa dalam Sejarah Politik Iran. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 16(2), 200-218.
- Ni'matul, D.M. (2017). *Program Nuklir Iran: Kajian Konflik Nuklir Iran dengan Negara P5+ 1 tahun 1979-2006*. [online] UIN Syarif Hidayatullah. Dalam: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36774/1/DEWI%20MAHMUDAH%20-%20FAH.pdf> [Diakses 9 Juni 2021].
- Prabowo, A.H. (2021). *Kepentingan Iran Menyetujui Proliferasi Nuklir dalam Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Periode 2013-2015*. [online] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58246/1/ARIEF%20HADITIO%20PRABOWO.FISIP.pdf> [Diakses 15 Agustus 2021].
- Pramono, B. (2017). Perubahan Politik oleh Faktor Agama. *POLITIK*, 13(1). Dalam: <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/237> [Diakses 29 Juli 2021].
- Putra, I.N. and Pramono, S.H. (2017). Konsepsi pembangunan kekuatan dan kemampuan sistem informasi operasi TNI AL dalam mendukung penyelenggaraan strategi pertahanan laut nusantara. *Asro-Sttal-International Journal*, 7, 1-48.
- Sahide, A. (2013). Konflik Syi'ah-Sunni Pasca-The Arab Spring. *Jurnal Kawistara*, 3(3).
- Sari, R.M. (2017). *Konsep Wilayahul Faqih dalam Syiah Modern (Analisis Pemikiran Khomeini)*. [online] Repository Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Dalam: <http://repository.uinsu.ac.id/2998/> [Diakses 22 Juni 2021].

- Sihbudi, M.R. (1993). *Timur Tengah, Dunia Islam, dan Hegemoni Amerika*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Sihbudi, R.S. (1996). *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Smith, H. and Oleynik, M. (2017). *Iran*. London: Bradt travel guides
- Sondhaus, L. (2006). *Strategic Culture and Ways of War*. London: Routledge
- Sundari, R. (2019). *Wacana Program Nuklir Iran sebagai Upaya Deterrence terhadap Amerika Serikat*. [online] Digilib FISIPOL. Dalam: [https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/bitstream/handle/15717717/1414/S2-THESIS\\_PUBLIC-thn\\_terbit-Sundari\\_\\_Rio\\_-Complete-9a845843dd41b3da2915ff58785fb73e.PDF?sequence=2&isAllowed=y](https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/bitstream/handle/15717717/1414/S2-THESIS_PUBLIC-thn_terbit-Sundari__Rio_-Complete-9a845843dd41b3da2915ff58785fb73e.PDF?sequence=2&isAllowed=y) [Diakses 15 Maret 2021].
- Suryani, A., Muchtar, A.D. dan Syarif, I. (2021). Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam: Telaah Pemikiran dan Peradaban Islam di Iran. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 170-176.
- Tylor, E.B. (1865). *Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization*. London: the University of California
- Torbat, A.E. (2020). *Politics of Oil and Nuclear Technology in Iran*. London: Palgrave Macmillan.
- Victoria, C.H. (2011). *Peran Lobi American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri AS terkait Program Nuklir Iran (Periode 2005-2007)*. [online] Rrepository Universitas Al Azhar Indonesia. Dalam: <https://eprints.uai.ac.id/847/> [Diakses 24 Juli 2021].
- Widhyatama, S. (2012). *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*. Bandung: PT Balai Pustaka.
- Wiranata, I.G.A. dan SH, M. (2011). *Antropologi Budaya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Wohlforth, W.C. (2008). Realism and foreign policy. *Foreign policy: theories, actors, cases*. Scientific Research, [online] 2, 35-53. Dalam: <https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2910106> [Diakses 18 Agustus 2021].